

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN

Reza Mu'tiqul Azmi^{1*}, Jihad Lukis Panjawa²

^{1,2}**Universitas Tidar**

E-mail: ¹⁾ rezaazmii18@gmail.com, ²⁾ jipanjawa@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dan timer series dalam bentuk tahunan dari tahun 1996-2021 serta menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk mengestimasi model maka akan diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan tidak signifikan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: GDP, Kemiskinan, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah

Abstract

This study aims to analyze the effect of economic growth, government spending on education and health, and unemployment on poverty in Indonesia. By using secondary data and timer series in annual form from 1996-2021 and using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method to estimate the model, the effect of the independent variable on the dependent variable in the short and long term will be known. The results show that in the short term economic growth has a negative and significant effect on poverty and government spending on health has a positive and significant effect on poverty. In the long term economic growth and government spending on education have a negative effect on poverty but not significant, government spending on health has a positive effect on poverty and not significant. While the unemployment variable has a positive and significant effect on poverty.

Keywords: GDP, Government Expenditure, Poverty, Unemployment

1. PENDAHULUAN

Hampir sebagian negara atau bahkan seluruh negara yang ada di dunia menghadapi permasalahan kemiskinan. Bagi negara yang telah maju juga menganggap kemiskinan merupakan masalah yang harus diatasi. Terlebih bagi negara-negara berkembang yang memiliki penduduk dengan jumlah yang cukup besar, maka tidak heran jika negara berkembang akan menghadapi masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di negara-negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks artinya kemiskinan menyangkut

banyak hal tidak hanya satu dua hal saja dan juga saling berhubungan. Tidak hanya menyangkut pada aspek ekonomi, kemiskinan juga menyangkut aspek-aspek di luar ekonomi. Pada tahun 1984 merupakan tahun pertama pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Jumlah penduduk miskin yang tinggi mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di suatu negara semakin parah. Tercatat jumlah kemiskinan di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1998 persentase kemiskinan yang mencapai 24,2 persen terus mengalami penurunan menjadi satu digit pada tahun 2019 yaitu 9,22 persen. Hal tersebut memberikan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia semakin sedikit dan membaik. Angka kemiskinan yang mengalami penurunan hingga mencapai satu digit merupakan suatu hal yang baik bagi negara Indonesia. Jika dilihat dari persentase kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di Indonesia, tingkat kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Perkotaan dan Pedesaan (2010-2021)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)											
	Tahun											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	11.1	10.95	10.51	10.63	10.36	10.62	10.49	10.27	10.13	9.86	12.04	11.86
Desa	19.93	18.94	18.09	17.92	17.37	17.89	17.28	16.31	15.54	14.93	15.51	14.64
Kota+Desa	31.02	29.89	28.59	28.55	27.73	28.51	27.76	26.58	25.67	24.79	27.55	26.5

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, n.d.), diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan dari tahun 2010 sampai 2021. Angka penduduk miskin di pedesaan selalu lebih besar dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Meskipun selama 12 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di perkotaan maupun di pedesaan mengalami penurunan namun masih saja penduduk miskin di pedesaan mencapai angka yang lebih besar. Seperti pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di perkotaan 11,1 juta jiwa lebih kecil dari jumlah penduduk di pedesaan 19,93 juta jiwa. Perbandingan jumlah penduduk miskin mencapai 8 juta jiwa dan tentunya tidak bisa dikatakan jumlah yang sedikit. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut pemerintah telah mengupayakan berbagai program maupun bantuan kepada penduduk miskin agar dapat menekan tingkat kemiskinan di Indonesia terlebih di wilayah pedesaan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan sejauh ini lebih condong pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sehingga ketidaktepat sasaran menjadi masalah dalam penyaluran bantuan. Penanggulangan kemiskinan menjadi hak rakyatnya. Hal ini berarti, negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dan lain-lain (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2017). Dalam penelitian (Klasen, 2015) jenis pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer. Adapun dana maupun program-program yang diberikan pemerintah seperti Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP), Beras Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan bantuan

lainnya. Pengeluaran pemerintah baik untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun yang lainnya dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah dalam mengupayakan penanganan kemiskinan telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Negara bagian di mana pendapatan per kapita lebih tinggi, rasio kemiskinan adalah lebih rendah. Ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan. Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan. Juga jelas dari analisis ekonometrik bahwa sifat pengeluaran publik penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Sasmal & Sasmal, 2016).

Studi empiris lain yang telah dilakukan Alviano et al. (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu GDP (*Gross Domestic Product*). GDP dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena GDP dapat mengukur total pendapatan masyarakat dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara secara bersamaan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian (Ilyas, 2019) yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan.

Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan baik makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal maupun yang lainnya. Ketidakmampuan dalam hal tersebut dapat dikarena seseorang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Dengan kata lain seseorang tersebut merupakan pengangguran. Sehingga pengangguran dapat menyebabkan terciptanya kemiskinan. Penelitian Hartati et al. (2015) membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan artinya ketika tingkat pengangguran meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang dan *gap research* diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menggunakan GDP, pengeluaran pemerintah pada pendidikan dan kesehatan, pengangguran dengan kemiskinan di Indonesia menggunakan metode ARDL. Dengan menggunakan data tahunan dengan rentan waktu tahun 1996-2021 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Worldbank diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi manfaat dan gambaran bagi masyarakat terutama pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

Menurut Rahman et al. (2019) dimensi kemiskinan dari perspektif ilmu ekonomi memiliki arti bahwa kemiskinan ialah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan individu maupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di berbagai daerah. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya tetapi lebih banyak upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan untuk provinsi termiskin dan daerah pedesaan (Qi & Wu, 2015).

Sedangkan penyebab kemiskinan menurut Suryawati (2005) disebabkan oleh dua hal karena sifat alami dan kebijakan pembangunan atau pemerintah. Kemiskinan karena sifat alami berarti sifat yang berasal dari sikap masyarakat atau individu, yaitu pertama keterbatasan sumber daya modal dan kedua lokasi atau letak strategis suatu wilayah yang terpeceh dan sulit dijamah sehingga mengakibatkan susah berhubungan dengan penduduk wilayah maju. Kemiskinan karena kebijakan pemerintah dilihat dari pembangunan yang tidak memperhatikan daerah yang terbelakang. Adanya ketimpangan antara kota dan desa, dan kuangnya perhatian terhadap usaha kecil maupun mikro.

Menurut Haughton & Khandker (2012), kemiskinan selalu berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan karena orang yang bukan miskin bisa menjadi miskin sewaktu-waktu apabila tengah menghadapi masalah seperti krisis keuangan dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan suatu dimensi pokok kesejahteraan karena hal itu mempengaruhi perilaku setiap orang dalam investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta pemahaman terkait keadaan masing-masing. Teori Nurkse mengatakan bahwa kemiskinan berpijak pada teori lingkaran setan kemiskinan, ketidaksempurnaan pasar, minimnya modal, dan rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Produktivitas yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang rendah serta pendapatan yang akan diperoleh pun juga rendah. Pendapatan yang rendah selanjutnya akan menurunkan investasi dan tabungan. Jika hal tersebut terjadi dimana pendapatan terus turun akan mengakibatkan kemiskinan sebab modal untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terpenuhi (Kuncoro, 1997).

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kenaikan PDB atau PNB riil pada tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2011). PDB atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan alat ukur terbaik dari kinerja perekonomian yang menghitung pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa suatu negara. GDP menjadi cerminan dari kinerja ekonomi karena GDP mengukur pendapatan masyarakat suatu negara. Dengan demikian, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah (Mankiw, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang dalam kemampuan menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pengertian ini memiliki tiga komponen : 1). Pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari stok barang yang terus bertambah. 2). Teknologi maju menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan bermacam-macam barang untuk penduduk. 3). Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2004).

Menurut Soleh (2012) pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk menambah stabilitas nasional dan mengurangi pengangguran atau kemiskinan di samping itu juga perlu memperhatikan capaian tolak ukur pembangunan lainnya supaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori Trickle Down Effect yaitu apabila terjadi kemajuan dalam suatu masyarakat atau wilayah maka dengan sendirinya menetes ke bawah yang mana dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menitikberatkan pada sektor utama pertumbuhan ekonomi supaya menebarkan hasil pertumbuhan ekonomi itu ke sektor yang lain. Menurut Muana (2001) pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai sumber pokok peningkatan standar hidup. Kemampuan suatu negara dalam menaikkan standar hidup warga negaranya bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah bertambahnya kemampuan suatu perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada pergantian yang bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kesejahteraan suatu wilayah. Semua wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih kurang tinggi akan berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai tinggi dan menurunkan angka kemiskinan (Jonaidi, 2012).

2.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mendorong laju investasi, kesempatan kerja dengan menjaga kestabilan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada teori makro perkembangan pengeluaran pemerintah oleh para ahli di masukkan ke dalam pembangunan mengenai pertambahan pengeluaran atau belanja yang penting untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang ditemukan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan yaitu melewati pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.

Menurut teori Rostow yang membahas terkait pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, Rostow mengemukakan bahwa langkah awal pertumbuhan ekonomi membutuhkan persentase yang besar pada investasi pemerintah terhadap jumlah investasi yang tersedia sebab pada langkah awal ini pemerintah harus mempersiapkan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Dampak dari pengeluaran pemerintahan tersebut melalui investasi pada sarpras yang diperlukan dapat memicu peningkatan output serta mengurangi total kemiskinan yang terjadi (Prasetya et al., 2011).

Pengeluaran pemerintah memiliki tujuan memelihara kestabilan perekonomian dan pemerataan distribusi pendapatan juga bertujuan untuk meningkatkan modal fisik di suatu wilayah seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dengan demikian perekonomian bertambah tinggi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2011). Persoalan utama dari kemiskinan yaitu kapasitas penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan dari taraf keperluan hidup mereka. Misalnya dalam mendapatkan layanan kesehatan atau pendidikan sehingga fungsi pemerintahan melalui pengeluaran atau belanja bagi penduduk miskin menjadi solusi yang baik untuk memperoleh pelayanan umum. Menurut Mankiw (2006) pemerintah mempunyai perangkat kebijakan fiskal untuk memberikan dampak pada tujuan pembangunan negara. Kebijakan fiskal tersebut berasal dari dua komponen utama, yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Sama halnya pada pandangan Keynes yang

mengemukakan peran pemerintah melalui kebijakan dengan tiga maksud yang mempunyai target berbeda setiap masing-masing kebijakan.

2.4. Pengangguran

Menurut Muana (2001) pengangguran merupakan bukti nyata yang tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja tetapi dihadapi oleh negara maju dan hal tersebut secara umum pasti terdapat pengangguran. Pengangguran pada dasarnya ialah tidak adanya output yang dihasilkan dan terciptanya penderitaan bagi orang yang tidak bekerja. Pengangguran juga menimbulkan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk kebutuhan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan.

Lebih lanjut, Muana (2001) menyebutkan bahwa pengangguran memberikan dampak bagi individu, masyarakat, atau perekonomian. Adapun dampak yang ditimbulkan, yaitu masyarakat tidak bisa mengoptimalkan kesejahteraan yang barangkali dapat dicapai karna jika kesejahteraan rendah maka muncul masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ataupun penderitaan. Pengangguran juga membuat sumber penghasilan hilang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Menurut Arsyad (1999) terdapat hubungan erat antara pengangguran dan kemiskinan. Bagi mereka yang tidak bekerja atau bekerja paruh waktu selalu berada pada golongan masyarakat miskin sedangkan yang bekerja di sektor formal atau di pemerintahan berada pada golongan masyarakat menengah atas. Semakin banyak orang yang mencari kerja namun peluang kerja yang sedikit akan menambah parah total pengangguran. Angkatan kerja yang semakin meningkat dan total pengangguran yang tinggi dapat berakibat pada minimnya penghasilan masyarakat yang mana nantinya akan mengurangi kemakmuran dan pada akhirnya akan menciptakan keadaan masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan (Sukirno, 2004).

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, *Gross Domestic Product* (GDP), dan pengangguran total terhadap kemiskinan. Data-data tersebut diambil dari World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur-literatur lain seperti jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Tempat penelitian yang digunakan yaitu Negara Indonesia selama periode tahun 1996-2021.

Secara umum persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$POV_t = \alpha + \beta_1 GDP_t + \beta_2 GEE_t + \beta_3 GEH_t + \beta_4 UE_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

POV	= Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) (juta jiwa)
GDP	= <i>Gross Domestic Product</i> (%)
GEE	= Pengeluaran Pemerintah pada sektor Pendidikan (%)
GEH	= Pengeluaran Pemerintah pada sektor Kesehatan (%)
UE	= Pengangguran (%)
α	= Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Parameter
 ε = Variabel gangguan (*error terms*)
 t = Subscript (*data time series*)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ARDL*. *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* merupakan metode yang dikembangkan oleh Pesaran dan Shin. Metode *ARDL* dapat digunakan pada data dengan tingkat stasioneritas yang berbeda baik pada level maupun 1st difference akan tetapi tidak bisa dilakukan jika data stasioner pada tingkat 2nd difference. Selain dilakukan uji-uji lain dalam penelitian ini seperti uji stasioneritas, uji kointegrasi, dan asumsi klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

a. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas dilakukan pada data *time series* untuk melihat apakah data tersebut stasioner atau tidak stasioner.

Tabel 2 Hasil ADF dan PP pada Level dan 1st Difference

Variabel	Level			Hasil
	ADF Value	Critical Value	Prob.	
POV	-2.01453	-2.9862	0.2791	Non Stasioner
GDP	-4.12951	-2.9862	0.0039	Stasioner
GEE	-2.31655	-2.9862	0.1748	Non Stasioner
GEH	-2.09962	-2.9862	0.2464	Non Stasioner
UE	-0.77900	-2.9862	0.8078	Non Stasioner
Variabel	1 st Difference			Hasil
	ADF Value	Critical Value	Prob.	
POV	-3.87563	-2.9918	0.0073	Stasioner
GDP	-6.30174	-2.9918	0.0000	Stasioner
GEE	-6.07441	-2.9918	0.0000	Stasioner
GEH	-5.38340	-2.9918	0.0002	Stasioner
UE	-4.43900	-2.9918	0.0020	Stasioner

Ket: Tingkat signifikan yang digunakan 5% (0.05)

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

Menggunakan Uji akar unit dari ADF dan PP menunjukkan variabel GDP stasioner pada level sedangkan variabel lainnya yaitu POV, GEE, GEH dan UE stasioner pada 1st difference. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *ARDL* tepat untuk mengestimasi model kemiskinan di Indonesia.

b. Penentuan Lag Optimal

Penentuan *lag* optimal dilakukan untuk mengetahui panjang lag atau kelambanan pada variabel yang memberikan pengaruh atau respon yang signifikan. Penentuan lag yang optimal ditentukan dengan menggunakan beberapa criteria (Greene, 2002), yaitu: LR (*Likelihood Ratio*), AIC (*Akaike Information Criteria*), SC (*Schwarz Information Criterion*), FPE (*Final Prediction Error*) dan HQ (*Hannan-Quinn Information Criterion*).

Tabel 3 Hasil Penentuan Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-200.4171	NA	9.432854	16.43337	16.67715	16.50098
1	-121.2657	120.3102*	0.129978*	12.10126*	13.56391*	12.50693*

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

Hasil penentuan lag optimal menghasilkan bahwa lag optimal yaitu pada lag 1 untuk semua kriteria. Sehingga lag 1 digunakan sebagai lag optimal untuk mengestimasi model. Hasil estimasi model ARDL menggunakan panjang kelambanan dengan metode Akaike Information Criterion menghasilkan ARDL (1 1 0 1 0). Angka menunjukkan panjang kelambanan. Angka nol menunjukkan tidak ada kelambanan. Urutan angka pada ARDL adalah urutan variabel yang diestimasi. Variabel POV, GDP, dan GEH memiliki panjang kelambanan 1, GEE dan UE dengan panjang kelambanan 0 atau tidak ada kelambanan. Hasil estimasi ARDL adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Estimasi ARDL

Selected Model: ARDL(1, 1, 0, 1, 0)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
POV(-1)	0.787816	0.171862	4.583999	0.0003
GDP	-0.475305	0.123520	-3.847998	0.0013
GDP(-1)	0.379573	0.194877	1.947756	0.0682
GEE	-2.590434	1.065761	-2.430595	0.0264
GEH	4.406266	1.534210	2.872010	0.0106
GEH(-1)	-2.897359	1.313758	-2.205398	0.0415
UE	0.787927	0.576013	1.367899	0.1892
C	8.567021	7.528450	1.137953	0.2709
R-squared	0.951737	Mean dependent var		33.28680
Adjusted R-squared	0.931864	S.D. dependent var		6.576081
S.E. of regression	1.716546	Akaike info criterion		4.172843
Sum squared resid	50.09100	Schwarz criterion		4.562883
Log likelihood	-44.16053	Hannan-Quinn criter.		4.281023
F-statistic	47.89098	Durbin-Watson stat		1.819223
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

c. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi menunjukkan apakah setiap variabel terhadap variabel lain saling terkointegrasi dalam jangka panjang.

Tabel 5 Hasil Uji Kointegrasi Bound Tes

F-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship		
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
F-statistic	8.470248	10%	2.2	3.09
k	4	5%	2.56	3.49
		2.5%	2.88	3.87
		1%	3.29	4.37

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

Hasil uji kointegrasi *Bound Testing Approach* yang dilakukan menghasilkan nilai F-statistik (8.4702) lebih besar dari I(1) baik pada tingkat signifikan alpha 1%, 5% maupun 10%. Sehingga dari hasil tersebut menolak H_0 yang berarti terdapat kointegrasi antara variabel yang diteliti. F-statistik juga lebih besar dari I(0) pada semua tingkat signifikan sehingga dapat disimpulkan terdapat kointegrasi antar variabel.

Estimasi model ARDL dilakukan untuk melihat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil estimasi ARDL ECM jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek

ECM Regression				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP)	-0.475305	0.061140	-7.774020	0.0000
D(GEH)	4.406266	0.683003	6.451310	0.0000
CointEq(-1)*	-0.212184	0.026164	-8.109808	0.0000
R-squared	0.902875	Mean dependent var		0.160000
Adjusted R-squared	0.894045	S.D. dependent var		4.635619
S.E. of regression	1.508928	Akaike info criterion		3.772843
Sum squared resid	50.09100	Schwarz criterion		3.919108
Log likelihood	-44.16053	Hannan-Quinn criter.		3.813410
Durbin-Watson stat	1.819223			

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat hasil estimasi model ARDL jangka pendek dengan model ECM. Hasilnya variabel koreksi kesalahan yang ditunjukkan oleh variabel CointEq(-1) memiliki nilai diantara -1 sampai 0 yaitu (-0.2121) atau bertanda negatif dan juga signifikan dengan nilai probabilitas (0.0000). Dari hasil tersebut model ARDL ECM merupakan model yang valid dan menunjukkan adanya kointegrasi antara variabel dependen dengan variabel independen.

Hasil estimasi ARDL ECM jangka pendek tersebut menunjukkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan yaitu variabel GDP dan GEH. Variabel GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien (-0.4753) dan signifikan pada alfa 5% (0.0000). Hal tersebut berarti ketika GDP meningkat maka akan menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel GEH atau pengeluaran pemerintah pada kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien (4.4062) dan signifikan pada alfa 5% (0.0000). Hal tersebut berarti ketika GEH meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan dalam jangka pendek.

Berikut hasil estimasi ARDL jangka panjang:

Tabel 7 Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

Levels Equation				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP	-0.451175	0.998007	-0.452076	0.6569
GEE	-12.20844	10.74014	-1.136711	0.2714
GEH	7.111322	10.71203	0.663863	0.5157
UE	3.713419	1.726002	2.151457	0.0461
C	40.37547	29.59051	1.364474	0.1902
EC = POV - (-0.4512*GDP -12.2084*GEE + 7.1113*GEH + 3.7134*UE +40.3755)				

Sumber: Hasil olah data Eviews.10

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat hasil estimasi model ARDL jangka panjang. Dalam jangka panjang variabel yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan hanya variabel UE atau pengangguran. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu GDP, GEE, dan GEH tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dalam jangka panjang. Variabel UE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien (3.7134) dan signifikan pada alfa 5% (0.0461). Hal tersebut berarti ketika pengangguran meningkat maka kemiskinan akan meningkat dalam jangka panjang.

d. Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah sebaran data pada setiap variabel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas JB menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0.7673) lebih besar dari alfa 5% (0.05) sehingga menerima H_0 yang berarti data telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang disebabkan oleh residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model. Hasil uji autokorelasi Bruesch-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar (0.8893) lebih besar dari alfa 5% (0.05) sehingga menerima H_0 yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian variabel gangguan (*error terms*) konstan atau tidak. Hasil uji heteroskedastisitas Bruesch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar (0.4438) lebih besar dari alfa 5% (0.05) sehingga menerima H_0 yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen dalam model. Hasil uji multikolinieritas dengan VIF menunjukkan semua nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga menerima H_0 yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas.

5. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, sehingga akan diketahui bentuk model empiris berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Hasil uji linier dengan Ramsey Reset Test menunjukkan nilai

probabilitas sebesar (0.2872) lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0.05) sehingga menerima H_0 yang berarti spesifikasi model dalam bentuk linier.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Nilai koefisien sebesar (-0.4753) serta nilai probabilitas sebesar (0.0000) atau dapat dikatakan kurang dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.4753 juta jiwa. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang mana jika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini GDP meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Linggawati & Wenagama, 2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Penelitian lain yang dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Ilyas, 2019) dan (Primandari, 2018) yang sama-sama menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (-0.4511) serta nilai probabilitas sebesar (0.6569) atau dapat dikatakan lebih dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.4511 juta jiwa walaupun tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetyia et al., 2011) yang menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan periode penelitian 2006-2008.

4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek variabel GEH atau pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Nilai koefisien sebesar (4.4062) serta nilai probabilitas sebesar (0.0000) atau dapat dikatakan kurang dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GEH 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 4.406 juta jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mismidawati & Sari, 2013) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan yang berarti bahwa setiap penambahan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia dengan periode penelitian 2001-2012.

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel GDP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (-0.4511) serta nilai probabilitas sebesar (0.6569) atau dapat dikatakan lebih dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.4511 juta jiwa walaupun tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetyia et al., 2011) yang menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan periode penelitian 2006-2008.

4.2.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel GEE atau pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (-12.2084) serta nilai probabilitas sebesar (0.2714) atau dapat dikatakan lebih dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan GEE 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 12.2084 juta jiwa walaupun tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fithri & Kaluge, 2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan belum sepenuhnya tepat sasaran dalam membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak serta menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia.

4.2.4. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang variabel UE atau pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien sebesar (3.7134) serta nilai probabilitas sebesar (0.0461) atau dapat dikatakan kurang dari alfa 0.05. Hal ini berarti setiap kenaikan UE 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 3.7134 juta jiwa dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alviano et al., 2020) dan (Primandari, 2018) yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan masing-masing di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh DGP, Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan, serta Pengangguran terhadap Kemiskinan studi kasus Indonesia selama periode tahun 1996 sampai 2021 menggunakan metode ARDL maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi atau GDP dan GEH atau pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan namun ketiganya tidak signifikan dalam jangka panjang. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviano, R., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(4), 777–792.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS. (n.d.). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa), 1996-2021*.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129–136.
- Greene, W. H. (2002). *Econometric Analysis* (5th Edition). In *Journal of the American Statistical Association* (Vol. 89, Issue 428). <https://www.jstor.org/stable/2291031?origin=crossref>
- Hartati, E., Riani, I. A. P., & Bisai, C. M. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, II(1), 61–71.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja , dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal EcceS Abstract : Economics, Social, and Development Studies*, 6(1), 72–90.
- Jhingan, M. (2004). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 140–164.
- Klasen, S. (2015). *Economic Growth And Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues*. OECD Development Centre, No.246.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Linggawati, N. W., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 400–411.
- Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro* (Edisi Ket). Salemba Empat.
- Mismidawati, & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 147–161.
- Muana, N. (2001). *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022*. 97. http://bappeda.jogjapro.go.id/download/index?id_kategori=103
- Prasetyia, F., Wuladari, F., & Utama, R. S. (2011). *Pengeluaran Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. XI(2), 99–116.
- Primandari, N. R. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi dan Pengangguran

- terhadap Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1–10.
- Qi, D., & Wu, Y. (2015). A multidimensional child poverty index in China. *Children and Youth Services Review*, 57, 159–170. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.08.011>
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi*. 3(6), 1542–1548.
- Sasmal, R., & Sasmal, J. (2016). Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 604–618.
- Soleh, A. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 197–209.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, 08(03), 121–129.